UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai Instrumen Fiskal Daerah: Studi
Implementasi di Pemerintah Kota Kediri**
Afina Fauziah Widya Sariningtyas, Dr. Ario Wicaksono
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Abstrak

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan salah satu instrumen transfer ke daerah yang bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal melalui pendanaan program kesejahteraan masyarakat, kesehatan, penegakan hukum, dan pembinaan sektor pertembakauan. Kota Kediri sebagai salah satu penerima DBH CHT terbesar di Provinsi Jawa Timur memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai berbagai program sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan DBH CHT sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah di Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pemanfaatan DBH CHT di Kota Kediri. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif agar bisa menggambarkan dinamika implementasi yang terjadi. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori Pressman dan Wildavsky (1973) yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, keputusan implementasi, koordinasi antar lembaga, kapasitas pelaksana, dan probabilitas keberhasilan implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan DBH CHT di Kota Kediri telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Kejelasan tujuan kebijakan menjadi landasan dalam penyusunan program dan pengalokasian anggaran pemerintah daerah. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, penegakan hukum di bidang cukai, serta dukungan terhadap sektor tembakau. Koordinasi antar lembaga berlangsung secara terstruktur melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang didukung oleh komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta sistem pengawasan yang memadai. Berdasarkan perspektif Pressman & Wildavsky, implementasi pemanfaatan DBH CHT di Kota Kediri memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi karena didukung oleh kejelasan tujuan, koordinasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kata kunci: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT, implementasi kebijakan, kebijakan fiskal daerah, Pressman dan Wildavsky, Kota Kediri.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai Instrumen Fiskal Daerah: Studi Implementasi di Pemerintah Kota Kediri
Afina Fauziah Widya Sariningtyas, Dr. Ario Wicaksono
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Abstract

The Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBH CHT) is one of the instruments for transferring funds to local governments, aimed at supporting the implementation of fiscal policy through the funding of programs related to public welfare, health, law enforcement, and the development of the tobacco sector. The city of Kediri, as one of the largest recipients of the DBH CHT in East Java Province, utilizes these funds to finance various programs in accordance with Minister of Finance Regulation No. 72 of 2024. This study aims to analyze the implementation of the use of DBH CHT as a local fiscal policy instrument in Kediri City.

This study employs a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the implementation of the use of DBH CHT in Kediri City. Research data were collected through interviews, observations, and a review of legislation and other supporting documents. Data analysis was conducted using descriptive analysis to illustrate the dynamics of the implementation process. Policy implementation analysis draws on the theory of Pressman and Wildavsky (1973), which emphasizes the importance of clear policy objectives, implementation decisions, interagency coordination, the capacity of implementers, and the probability of successful implementation.

The research findings indicate that the implementation of the use of DBH CHT in Kediri City has proceeded in accordance with applicable regulations. Clear policy objectives serve as the foundation for program development and local government budget allocation. Policy implementation is carried out through various programs aimed at improving community welfare, health services, social protection, law enforcement in the area of excise taxes, and support for the tobacco sector. Inter-agency coordination takes place in a structured manner through planning, implementation, and reporting mechanisms supported by the commitment of implementers, the availability of resources, and an adequate monitoring system. Based on the perspective of Pressman & Wildavsky, the implementation of DBH CHT utilization in Kediri City has a high probability of success because it is supported by clear objectives, effective coordination, the availability of resources, and compliance with regulations.

***Keywords**: Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBH CHT), policy implementation, local fiscal policy, Pressman and Wildavsky, Kediri City.*